

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan di Indonesia terutama dalam bidang pertanian telah mengarah pada upaya peningkatan produksi pangan dan pendapatan petani. Upaya tersebut ditunjukkan dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui kegiatan ekonomi petani untuk mencapai produksi padi yang melimpah salah satunya Aspek Program Pemerintah dalam subsidi benih 0,4% dan pupuk 7% dari total subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2015).

Produksi padi dalam bentuk gabah yang melimpah pada saat panen raya menyebabkan timbulnya fluktuasi harga gabah di tingkat petani karena lonjakan volume hasil panen (Anjak, 2010). Salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga di tingkat petani dan penggiling adalah peran para tengkulak yang menimbulkan adanya selisih harga pasar di tingkat petani dan penggiling dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) dan rantai pemasaran (Badan Pusat Statistik, 2015). Selisih harga GKP terjadi akibat adanya rantai pemasaran melalui tengkulak yang menekan petani dalam harga penjualan hasil panen selain itu permainan tengkulak akan memberikan penawaran harga yang tinggi terhadap penggiling. Selisih harga tersebut akan mempengaruhi harga beras yang akan ditawarkan oleh penggiling. Harga rata-rata GKP ditingkat petani dan penggiling

pada Tahun 2016 di provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 4.554,51 dan Rp. 4.659,91 per kg (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>1</sup>.

Permasalahan diatas menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dalam upaya melindungi petani dari kerugian dan fluktuasinya harga GKP pada saat panen raya (Anjak, 2010). HPP juga bertujuan untuk memantau harga secara berkala agar terhindar dari permainan harga gabah oleh para tengkulak (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>2</sup>. Harga Pembelian Pemerintah ditetapkan berdasarkan INPRES 5/2015 tanggal 17 Maret 2015 melalui pembelian gabah/beras dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) (Badan Ketahanan Pangan Pertanian, 2015). Harga pembelian pemerintah yang telah ditetapkan pada Tahun 2015 mengacu terhadap kenaikan jumlah kasus harga gabah di bawah HPP pada Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun terdahulu (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>2</sup>.

HPP pada Tahun 2015 sebesar Rp.3.700 belum sesuai dan tidak tepat digunakan pada Tahun 2017 disebabkan faktor nilai mata uang dan biaya pokok produksi padi pada Tahun 2017 berbeda dengan Tahun 2015 sehingga dapat mempengaruhi harga GKP di pasar. HPP yang bertujuan untuk melindungi petani dari kerugian tercapai apabila total biaya pokok produksi padi tidak dibawah HPP dan petani memperoleh keuntungan dari budidaya. Keuntungan dipeoleh dari penjualan gabah dikurangi total biaya. Upaya petani dalam memperoleh keuntungan yaitu dengan memperoleh harga jual GKP yang tinggi. Tahun 2016 Harga GKP diatas HPP sebesar 94,74%, dan Harga GKP sama dengan HPP sebesar 2,62% (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>3</sup>. Nilai tersebut menunjukan bahwa

dominan petani lebih banyak menjual GKP di luar pemerintah dibandingkan di dalam pemerintah karena harga gabah yang ada di pasaran lebih tinggi dari harga dasar atau HPP yang ditetapkan oleh pemerintah (Mardianto *et al.*, 2005). Harga jual gabah di Kabupaten Karawang pada Tahun 2015 ditingkat petani melebihi harga pembelian pemerintah. Rata-rata harga GKP saat itu dibeli oleh tengkulak di atas Rp.4.200/Kg (Kadarrisman, 2016). Peran tengkulak dalam rantai pemasaran gabah akan menyebabkan perubahan harga dan saluran dalam rantai pemasaran.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu sentra padi di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat Statistik Karawang, 2016). Kabupaten Karawang merupakan Produksi tertinggi ke-2 di Jawa Barat sebesar 1.028.009 ton setelah Kabupaten Indramayu sebesar 1.294.158 ton (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2016) Provinsi Jawa Barat juga memiliki produktivitas tanaman padi kedua tertinggi di Indonesia yaitu 6,122 ton/ha (Badan Pusat Statistik, 2016)<sup>4</sup>. Tahun 2015 produksi padi sawah di Karawang mencapai 1.532.055 ton sedangkan produksi padi ladang mencapai 6,261 ton (Badan Pusat Statistik Karawang, 2016).

Seluruh permasalahan di atas, memerlukan kajian tentang perbedaan harga gabah pembelian pemerintah dan non pemerintah dengan biaya pokok budidaya padi, pola distribusi, dan perhitungan margin pemasaran. Peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Pola Distribusi dan Margin Pemasaran Gabah di Kabupaten Karawang” dalam mengkaji stabilisasi harga gabah, pemasaran gabah, dan mengulas kembali harga pembelian pemerintah tentang gabah sehingga dapat mengefisiensi distribusi gabah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Nilai harga pembelian pemerintah (HPP) komoditas gabah yang ditetapkan INPRES 2015 belum sesuai dan tidak tepat digunakan pada Tahun 2017 disebabkan faktor nilai mata uang dan biaya pokok produksi pada Tahun 2017 berbeda dengan Tahun 2015 sehingga dapat mempengaruhi harga GKP di pasar.
2. Terdapat fluktuasi harga gabah di pasar karena adanya peran para tengkulak dalam rantai pemasaran yang menimbulkan perubahan pola distribusi pemasaran.
3. Peran tengkulak dalam rantai pemasaran mengakibatkan adanya selisih harga pasar pada tingkat petani dengan penggiling dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP).

## **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perbedaan biaya pokok produksi padi dengan harga pembelian pemerintah dan non pemerintah
2. Menganalisis pola distribusi gabah.
3. Menganalisis margin pemasaran gabah dalam rantai distribusi gabah di Kabupaten Karawang.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan acuan penelitian lebih lanjut.
2. Bagi praktisi dan *stakeholder* penelitian ini dapat digunakan untuk merancang dan mengefisienkan pendistribusian gabah.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam menyempurnakan kebijakan harga gabah sehingga dapat melindungi harga gabah dan melindungi petani dari peran permainan oknum.

#### **1.4. Hipotesis**

Hipotesis pada penelitian ini adalah :

1. Diduga terdapat perbedaan antara biaya pokok produksi padi dengan harga gabah pembelian pemerintah dan non pemerintah.
2. Diduga terdapat banyak pola distribusi pemasaran gabah di Kabupaten Karawang.
3. Diduga terdapat perbedaan margin pemasaran gabah di masing-masing pola dalam rantai pemasaran gabah di Kabupaten Karawang.